

Vol. 12 No. 1 (2024), Halaman 37-46




## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DI PULAU MIANGAS DENGAN PENDEKATAN KESEJAHTERAAN

Felina Marthina Timpal<sup>1\*</sup>, Suryo Sakti Hadiwijoyo<sup>2</sup>, Triesanto Romulo Simanjuntak<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: [372020074@student.uksw.edu](mailto:372020074@student.uksw.edu)<sup>1\*</sup>, [suryo.hadiwijoyo@uksw.edu](mailto:suryo.hadiwijoyo@uksw.edu)<sup>2</sup>, [triesanto.simanjuntak@uksw.edu](mailto:triesanto.simanjuntak@uksw.edu)<sup>3</sup>

Website Jurnal: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 29-01-2024; Direvisi: 07-03-2024; Disetujui: 29-06-2024)

---

### ABSTRACT

*This article aims to describe the Indonesia-Philippine border area on Miangas Island and analyze the Implementation of Border Area Development Policy on Miangas Island, Talaud Islands Regency, North Sulawesi Province. This article uses a qualitative descriptive research method with primary data obtained through interviews and Focus Group Discussion and secondary data obtained through literature. This article uses a welfare approach through Welfare State theory and Geoeconomic concepts to analyze the implementation of border area management policies on Miangas Island which focuses on the government's role in efforts to improve the welfare of the people on Miangas Island.*

**Keywords:** Border area, Prosperity approach, Miangas Island.

### ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kawasan perbatasan Indonesia-Filipina di Pulau Miangas dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Artikel ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui Wawancara dan hasil FGD serta data sekunder diperoleh melalui literatur. Artikel ini menggunakan pendekatan kesejahteraan melalui teori Welfare State dan konsep Geoekonomi dalam menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Pulau Miangas yang berfokus peranan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Miangas.*

**Kata Kunci:** Kawasan Perbatasan, Pendekatan Kesejahteraan, Pulau Miangas.

---

### PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam kerangka pembangunan nasional dimana aspek kesejahteraan memiliki peranan dalam rangka mencapai pembangunan nasional. Dalam kehidupan berbangsa Indonesia, kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya mengacu pada sila kelima dalam Pancasila yang memberikan

penekanan pada prinsip keadilan sosial sekaligus dalam UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 34 yang didalamnya memuat tentang pemerintah yang diamanatkan untuk bertanggung jawab atas pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam merumuskan atau menyusun strategi pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satu cita-cita pembangunan

Jokowi-Jusuf Kalla pada Periode Pemerintahan yang pertama yaitu tahun 2014-2019 untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam hal ini perbatasan (Rahman, 2018).

Pembangunan Perbatasan termasuk kedalam nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menjadikan Pulau-Pulau terdepan sebagai beranda Indonesia bukan hanya sekedar sebagai halaman belakang (BJ Encarnacau, 2022) dan menurut Jusuf Kalla, Pembangunan daerah perbatasan ini tidak hanya semata memperbaiki gerbangnya tetapi juga mencakup pembangunan aspek sosial dan ekonomi daerah perbatasan (Antara, 2017). Disisi lain, pembangunan kesejahteraan masyarakat ini masih memiliki dinamika ditengah penyelenggaraan kesejahteraan yang belum terintegrasi secara menyeluruh yang harusnya seimbang, dan selaras untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesiadi mana Program atau kebijakan dari pemerintah ini dinilai masih bersifat parsial dan belum didukung oleh kebijakan yang mengikat (Rahman, 2018). Perbatasan negara terbagi menjadi dua dimensi yaitu batas wilayah dan kawasan perbatasan (Hadiwijoyo, 2011). Dalam Undang-Undang wilayah negara, batas wilayah diartikan sebagai garis batas yang menjadi pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan pada hukum internasional dan Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang letaknya berada pada sisi dalam sepanjang batas wilayah NKRI dan negara lain (Hadiwijoyo, 2011). Jika berbatasan wilayah laut, menurut Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dimana Kawasan Perbatasan negara ialah wilayah kabupaten atau kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan Perbatasan negara meliputi Kawasan Perbatasan darat dan Kawasan Perbatasan laut, termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang dimana salah satunya ialah Pulau Miangas. Perbatasan negara merupakan

kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikatakan strategis karena secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena jaraknya yang berdekatan dengan negara tetangga dan disebut vital karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, nasionalisme, ideologi, sosial, ekonomi dan budaya (Arifin, 2015).

Pendekatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah perbatasan yang juga akan berimplikasi pada meningkatnya nasionalisme masyarakat wilayah perbatasan (BNPP, 2021). Pendekatan dalam Pembangunan perbatasan yang semulanya berfokus aspek keamanan atau *security approach* ini kemudian mengalami pergeseran paradigma menjadi pendekatan kesejahteraan yang selanjutnya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 kemudian terbentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang beranggotakan 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan (BNPP, 2021). BNPP memiliki tugas dan fungsi untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran pembangunan perbatasan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan perbatasan serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan pembangunan perbatasan (Kemensetneg, 2018).

Berdasarkan Perpres Nomor 118 tahun 2022 Pulau Miangas merupakan beranda depan yang menjadi Garda Terdepan NKRI karena Miangas merupakan pulau yang berbatasan dengan Filipina dan merupakan kawasan paling utara Indonesia dan pulau ini termasuk kedalam kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pulau ini memiliki nomor *base point* (TD). TD.056 dan mendekati pilar nomor TR.056. Secara geografis Pulau Miangas terletak pada 5°33'

15° LU - 126°35'18" BT ([BPPD SULUT, 2021](#)). Secara administratif pulau ini terbelang unik karena merupakan bagian dan desa dari Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dimana Pulau ini hanya memiliki satu desa dan satu kecamatan sehingga kemudian disebut sebagai kecamatan khusus ([Tampomuri, 2018](#)). Pulau Miangas merupakan salah satu Pulau yang menjadi identitas Indonesia, pulau ini merupakan salah satu penentu luas wilayah negara Indonesia dan terdapat perdebatan atau sejarah panjang dari pulau Miangas yang dahulu disebut Las Palmas atau *Palmas Island* yang dimana pulau ini menjadi persengketaan yang terjadi di masa lampau antara Amerika dan Belanda ([Rosa, 2022](#)).

Pulau ini memiliki potensi utama dalam kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, perkebunan kelapa dan perdagangan perbatasan dan jasa akan tetapi belum terkelola dengan baik ([Gagola, 2023](#)). Jarak Pulau Miangas dengan Manado yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara ialah sejauh 274 mil laut dan untuk perjalanannya biasanya ditempuh dalam tiga hari dan jarak Miangas dengan Melonguane yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu 60 mil laut dan memerlukan waktu tempuh sehari semalam sedangkan jarak tempuh antara Miangas dengan Davao Filipina

hanya memerlukan waktu tiga jam perjalanan dengan menggunakan kapal nelayan tradisional ([BPPD SULUT, 2021](#)).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif pada pengelolaan perbatasan di Pulau Miangas. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah kecamatan dan desa Miangas, masyarakat Miangas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI deputy Batas Laut serta FGD serta Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan BPPD SULUT serta data sekunder yang didapatkan melalui literatur, artikel ilmiah serta dokumen dari Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan BNPP RI.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konstelasi Geografis Indonesia-Filipina di Miangas**

Pulau Miangas merupakan bagian dari kecamatan khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas Pulau yaitu 3,15 km<sup>2</sup> dengan populasi sebanyak 816 Jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu 341 jiwa per km<sup>2</sup> ([Badan Pusat Statistik, 2023](#)).



**Gambar 1: Peta Pulau Miangas (BNPP, 2022)**

**Tabel 1. Data Kelompok Menurut Usia**

| Kelompok Umur   | Jumlah |
|-----------------|--------|
| 0-14 tahun      | 157    |
| 15-64 tahun     | 583    |
| 65 tahun keatas | 76     |
| Jumlah          | 816    |

Sumber: BPS, 2023.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Bekerja**

| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-----------------|--------|
| Petani          | 96     |
| Pedagang        | 21     |
| PNS             | 1      |
| Nelayan         | 53     |
| Lainnya         | 476    |
| Jumlah          | 647    |

Sumber: BPS, 2023.

Jumlah penduduk Miangas didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan presentase sebesar 71% dari total penduduk. Berdasarkan data, mata pencaharian penduduk Pulau Miangas didominasi oleh pekerjaan lainnya, nelayan dan pedagang dengan presentase penduduk yang bekerja sebesar 79% dari total penduduk ([Badan Pusat Statistik, 2023](#)). Mayoritas penduduk Miangas berasal dari suku Talaud yang masih memiliki kedekatan dengan negara Filipina dimana begitu banyak terdapat hubungan lintas batas atau perkawinan campur dengan warga negara Filipina dan terdapat aktivitas lintas batas tradisional antara masyarakat suku Talaud dengan warga Filipina serta hubungan perdagangan yang telah ada sejak lama dan berdasarkan perjanjian lintas batas atau *Border Crossing Agreement* (BCA) antara Indonesia-

Filipina tahun 1975 dimana aktivitas lintas batas yang dapat dilakukan ialah kunjungan keluarga, kegiatan sosial maupun hiburan, keperluan keagamaan maupun usaha atau perdagangan ([Gagola, 2023](#)).

### **Peluang Pengembangan Kawasan Perbatasan Pulau Miangas**

Sesuai dengan konsep geopolitik yang menekankan pada konstelasi ruang, wilayah Pulau Miangas yang merupakan salah satu dari 192 pulau yang dimiliki Indonesia ini juga berada pada ALKI III yang memiliki potensi perdagangan yang besar. Pulau paling utara dari Sulawesi yang merupakan bagian dari provinsi Sulawesi utara ini merupakan pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik yang memiliki posisi strategis yang ditopang oleh besarnya potensi sumber daya alam.



**Gambar 2: Posisi Miangas dengan negara 5 pengeksport Ikan segar di Asia (Dokumen Laporan Akhir BNPP, 2022)**

Salah satu dimensi geoekonomi menurut Soilen dalam hal ini sumber daya berkenaan dengan kondisi potensial di Pulau Miangas. Provinsi Sulawesi utara memiliki potensi perikanan terbesar ke-5 di Indonesia tahun 2010-2020 dengan produksi 264.998.49 ton yang kemudian Kab. Kepulauan Talaud termasuk Pulau Miangas menjadi penghasil perikanan terbesar yang ada di Sulawesi utara yang menjadi salah satu penggerak perekonomian di kawasan perbatasan ([BNPP RI, 2022](#)). Bagian utara Miangas memiliki kedekatan lokasi dengan 5 negara importer ikan segar asia, hal ini merupakan potensi besar bagi Pulau Miangas jika akan berorientasi untuk pasar export akan tetapi hal ini harus didorong oleh intervensi pemerintah dalam hal ini berusaha dalam skala besar dengan melihat fakta bahwa Miangas masih kesulitan dengan pengadaan alat-alat penunjang untuk perikanan maupun dalam pemasaran hasil perikanan ([BNPP RI, 2022](#)).

### **Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Berdasarkan konsep geoekonomi menurut Soilen yang dituangkan kedalam strategi pembangunan ekonomi, dimana salah satunya dimensinya yaitu menyangkut dengan kepercayaan, dalam hal ini berkaitan dengan visi dan misi pemerintah ([Priyono, 2017](#)) yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan pengelolaan perbatasan. Adapun kebijakan pengelolaan perbatasan yang ada di Pulau Miangas yang berdasarkan: 1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sesuai Perpres No.18 tahun 2020; 2). Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) tahun 2020-2024 sesuai Perpres No.118 tahun 2022; 3). Rencana Induk Lokasi Prioritas tahun 2014 dan 4). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Kab.Kep Talaud tahun 2014-2034 ([BNPP RI, 2022](#)).

Berdasarkan arah pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terdapat program di Miangas yaitu pengembangan pelabuhan di Miangas dan rehabilitasi atau pengembangan bandar Udara Miangas. Adapun arah proyek prioritas nasional di Kecamatan Miangas, yaitu : 1). Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 2).

Rehabilitasi kantor camat dan kantor desa; 3). Penyediaan sarana prasarana kesehatan; 4). Penyediaan alat-alat kesehatan; 5). Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar; 6). Pengadaan sarana belajar; 7). Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK; 8). Penambahan penyalur program BBM satu harga; 9). Pembangunan PLTS Rooftop; 10). Pengembangan Desa Digital ([BNPP RI, 2022](#)).

Dalam Renduk BWN-KP (Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan) tahun 2020-2024 yang diterbitkan oleh BNPP, terbagi atas kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Berkaitan dengan pengelolaan batas wilayah negara, Pulau Miangas menjadi salah satu nominasi untuk rencana pembangunan 8 PLBN Laut tahun 2022-2024 ([BNPP RI, 2022](#)) akan tetapi dalam pengimplementasiannya, hingga awal tahun 2024, pembangunan PLBN ini belum dapat terlaksana. Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan negara khususnya pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, terdapat kebijakan untuk : 1). Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan industri kelautan dan perikanan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kawasan Perbatasan dan PPKT yaitu di SKPT Talaud di PKSN Melonguane; 2). Pembangunan Transportasi Laut dengan pengembangan pelabuhan laut strategis, perluasan layanan jaringan perintis, jaringan tol laut, dan kapal ternak untuk meningkatkan distribusi barang dan komoditas unggulan daerah ([BNPP RI, 2022](#)).

Berdasarkan rencana induk Lokasi Prioritas (Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP berbasis Lokasi Prioritas (RENDUK LOKPRI ) di Miangas tahun 2014 yang berisi arah Kebijakan, strategi maupun agenda program prioritas pengelolaan Lokasi Prioritas ini memuat tentang kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Miangas, meliputi : 1). Pengembangan destinasi pariwisata; 2). Peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan di Kawasan; 3). Peningkatan pelayanan sarana prasarana kesehatan; 4). Peningkatan sarana prasarana dasar air bersih; 5). Pembuatan talud penahan pantai; 6). Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar listrik dan telekomunikasi di kawasan

perbatasan; 7). Peningkatan kualitas pelayanan sarana transportasi laut; 8). Perbaikan Sumber Daya Alam yang rusak di perbatasan ([BNPP RI, 2022](#)).

Kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten pasal 3 poin d dan f (RTRW Kab. Kepulauan Talaud 2014-2034 (Perda Kab. Talaud No 1 Tahun 2014) yang memuat tentang peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dan peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas ([BAPELITBANG, 2023](#)). Adapun strategi dalam peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas, meliputi: membangun sarana-prasarana penunjang perdagangan lintas batas; mengembangkan sistem perdagangan lintas batas dari *Border Cross Agreement* (BCA) menjadi *Border Trade Area* (BTA); meningkatkan penanganan masalah-masalah penyeludupan, perdagangan manusia dan *illegal fishing*; dan mengembangkan jaringan perhubungan laut dan udara dengan negara tetangga. Adapun rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut, udara, telekomunikasi, serta energi. Yaitu: a). Transportasi Laut : rencana pelabuhan penyebrangan antarnegara di Pulau Miangas dan pelabuhan pengumpul; b). Transportasi Udara : Bandar udara khusus di Kecamatan Miangas; c). Telekomunikasi : Pembangunan Mercusuar; d). Energi : PLTD SR. Miangas, Pembangunan PLTS dan rencana tangki eksisting penampungan BBM ([BNPP RI, 2022](#)).

### **Implementasi Kawasan Perbatasan di Pulau Miangas dengan Pendekatan Kesejahteraan**

Perbatasan Indonesia-Filipina di pulau Miangas ini merupakan daerah yang tergolong kedalam daerah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Adapun isu strategis yang ada di Pulau Miangas ialah berkaitan dengan aksesibilitas yang merupakan salah satu pendorong utama dalam pembangunan kawasan perbatasan dimana faktor ini akan berimplikasi pada kondisi sosial maupun perekonomian kawasan perbatasan ([Simbolon et al., 2015](#)). Adapun isu strategis yang ada di pulau Miangas yaitu transportasi, pelayanan dasar serta infrastruktur penunjang, Hal ini berhubungan dengan teori yang digunakan yaitu teori *welfare state*. Menurut teori ini negara memiliki peranan dalam menjamin ketersediaan

pelayanan kesejahteraan dasar bagi warga negaranya ([Sudiar, 2012](#))

Penggunaan teori *welfare state* dalam penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sonny Sudiar yang berjudul “Kebijakan pembangunan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan” tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini didukung oleh penggunaan konsep geoekonomi soilen yang memiliki irisan dengan teori *welfare state* karena didalam salah satu dimensinya berkaitan dengan visi misi pemerintah. Penggunaan teori *welfare state* dalam kajian pembangunan kawasan perbatasan dinilai layak untuk digunakan karena dalam melalui teori ini dapat memberikan penjelasan mengenai kehidupan atau kondisi masyarakat di kawasan perbatasan sekaligus dapat menganalisis komitmen pemerintah yang dituangkan melalui kebijakan pengelolaan perbatasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan ([Sudiar, 2012](#)).

### **Transportasi**

Transportasi yang umumnya digunakan untuk mengakses Pulau Miangas umumnya adalah dengan menggunakan Kapal Tol Laut yaitu kapal Sabuk Nusantara 109 dan 69 dimana kapal ini hanya beroperasi selama dua kali dalam satu bulan tetapi jika cuaca buruk, biasanya kapal ini akan berhenti beroperasi yang mengakibatkan terancamnya pasokan makanan yang akan dibawa ke Pulau Miangas (Hasil FGD, Juli 2023). Pilihan transportasi lain yang bisa digunakan untuk ke Miangas ialah menggunakan pesawat, dimana pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah meresmikan bandar udara di Miangas akan tetapi hingga saat ini Bandar udara di Miangas sudah tidak beroperasi pasca Covid dan terdapat persoalan *operational head cost* ([BNPP RI, 2022](#)). Permasalahan lainnya dalam menyangkut transportasi laut yang ada Pulau-Pulau Kecil Terluar yang ada di Sulawesi Utara ialah : Belum tersedia kapal perintis dan kapal penyebrangan dengan konstruksi khusus yang dapat digunakan masyarakat untuk mengangkut atau memuat BBM dan memuat atau mengawetkan hasil-hasil perikanan (BPPD SULUT, 2023).

### **Infrastruktur Penunjang**

Pulau Miangas sendiri memiliki dua dermaga, dimana satu dalam kondisi baik dan satu rusak berat dimana penyebabnya ialah faktor alam dikarenakan posisi geografis Pulau Miangas yang rawan akan gelombang ekstrem dan abrasi ([BNPP RI, 2022](#)). Selain itu belum adanya dermaga alternatif setiap pulau jika kondisi cuaca buruk di sekitar dermaga yang ada; serta belum tersedia sarana angkutan laut yang memadai bagi pelintas batas RI – Filipina ([BPPD SULUT, 2021](#)). Permasalahan lainnya di Pulau Miangas yang berkaitan dengan Infrastruktur, dimana terdapat banyak gedung atau fasilitas milik pemerintah yang terbengkalai atau rusak dikarenakan tidak memiliki biaya perawatan (Hasil FGD, Juli 2023). Selain itu, nelayan kesulitan dalam hal pemasaran ikan dan tidak tersedianya *cold storage* untuk mengawetkan hasil perikanan, padahal pengadaan alat tersebut justru akan mengangkat potensi kelautan, dimana masyarakat mayoritas adalah nelayan dimana potensi utama dari Pulau Miangas yaitu kelautan yang memiliki peluang untuk diekspor yaitu lobster dan ikan karang (Hasil FGD, Juli 2023).

### **Pelayanan Dasar**

Isu strategis yang ada di Pulau Miangas ini berkaitan dengan fasilitas penunjang perekonomian seperti pasar sehingga hingga saat ini masyarakat merasa kesulitan mengakses kebutuhan bahan pokok maupun sebagai perputaran roda perekonomian (Hasil wawancara, 2024) sehingga masyarakat harus berbelanja di ibukota Kabupaten yaitu Melonguane yang jarak tempuhnya 60 mil laut serta dengan menggunakan armada kapal Sabuk Nusantara yang hanya beroperasi setiap dua minggu (Hasil wawancara, 2024). Meski demikian, masih terdapat beberapa warung yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, detergen, minuman maupun makanan ringan serta kue dan buah-buahan ([BNPP RI, 2022](#)).

Kemudian berkaitan dengan akses listrik dan telekomunikasi, dimana akses listrik mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2019-2023 karena kini listrik sudah bisa diakses 1x 24 jam dimana sebelumnya hanya bisa diakses selama 6 jam dalam satu hari (Hasil FGD, 2023). Permasalahan lain justru dimana jaringan di Miangas sangat buruk selama tahun

2019-2023 dimana pada awal 2019 jaringan sudah stabil atau memadai tetapi hingga saat ini justru memburuk. Kemudian berkaitan dengan ketersediaan air bersih dimana ketersediaan air bersih di Miangas sendiri sudah memadai, akan tetapi penggunaan dananya ditalangi oleh dana desa dan tidak memiliki cadangan pompa air (Hasil FGD, 2023).

### **Pendidikan dan Kesehatan**

Pulau Miangas memiliki dua pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas ([Badan Pusat Statistik, 2023](#)) dimana menurut masyarakat akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas sudah cukup mudah dijangkau dan ketersediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan juga telah cukup memadai, akan tetapi kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik terdekat masih sangat sulit untuk dicapai dan dalam ketersediaan alat-alat kesehatan yang tergolong masih terbatas (Hasil wawancara, 2024).

Berkaitan dengan bidang pendidikan yang ada di Pulau Miangas, kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan SMA, MA serta Akademi/Perguruan Tinggi tergolong sangat sulit oleh masyarakat dan di Pulau Miangas hanya terdapat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan penuturan dari kepala desa Miangas dimana sebanyak 75% angka putus sekolah dan mayoritas penduduk siswa yang ada di Miangas hanya tamatan SMK dan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi (Hasil FGD, Juli 2023). Berkaitan dengan kondisi fisik Gedung TK & PAUD yang ada di Pulau Miangas saat ini dalam kondisi rusak berat sementara SD dan SMP hingga saat ini dalam kondisi rusak sedang (Hasil FGD, Juli 2023). Fasilitas pendidikan di Pulau Miangas sendiri sudah tergolong cukup memadai, akan tetapi harus juga didorong dengan pemberdayaan tenaga pendidikan dengan mendorong rekrutmen guru-guru dari masyarakat lokal Miangas serta memberikan bantuan penyelesaian studi bagi anak-anak kawasan perbatasan yang ingin melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi dengan melihat fenomena yang terjadi di Pulau Miangas.

Komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan

teori *welfare state* dalam hal ini masyarakat perbatasan sudah cukup layak untuk diakui peranannya melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Bentuk kehadiran negara dalam Pengelolaan perbatasan dapat dilihat dimana pengelolaan perbatasan bukan hanya menjadi wewenang pemerintah pusat akan tetapi juga pemerintah daerah memiliki wewenang atau tugas dalam pengelolaan kawasan perbatasan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat ([Rachman et al., n.d.](#)). Hal ini kemudian

tercermin dalam penyediaan fasilitas-fasilitas dalam pemenuhan pelayanan kesejahteraan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan, lewat indikator negara sejahtera menurut Esping Andersen diantaranya ialah hak dalam mendapatkan pendidikan serta jaminan sosial bagi masyarakat ([Rachman et al., n.d.](#)) meskipun dalam pengimplementasiannya masih terdapat begitu banyak kendala maupun tantangan.



Gambar 3: Peta dan Sarana Prasarana di Miangas (Dokumen Laporan Akhir BNPP, 2022).

Tabel 3. Fasilitas Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | Jumlah | Jumlah Murid | Jumlah Guru | Rasio Murid dan Guru |
|--------------------|--------|--------------|-------------|----------------------|
| SD                 | 1      | 66           | 6           | 11                   |
| SMP                | 1      | 34           | 5           | 6,8                  |
| SMK                | 1      | 29           | 13          | 2,33                 |

Sumber: Dokumen Laporan Akhir BNPP, 2022.

### Tantangan dalam Implementasi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Pulau Miangas

Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia sudah tergolong cukup baik, yang dibuktikan lewat komitmen pemerintah dalam mengencangkan proyek-proyek pembangunan kawasan perbatasan yang

ada di Indonesia. Hal ini juga senada diungkapkan oleh Mahfud MD selaku Menkopolkam dimana menurutnya dengan didukung oleh berbagai sumber dan data dimana, secara bertahap wajah perbatasan sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ([BNPP RI, 2023](#)).



Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri akan hambatan atau tantangan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan yang ada di Kawasan Perbatasan Indonesia. Adapun beberapa tantangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, meliputi: 1). Ego sektoral hal ini berkaitan dengan dimana pengelolaan perbatasan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kemudian terdapat banyak aktor dengan berbagai kepentingan yang justru menghambat pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; 2). Lemahnya komitmen kementerian/lembaga, berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2017, dimana terdapat 23 anggota kementerian/lembaga yang menjadi bagian dari BNPP, dengan adanya hal itu kemudian menjadi suatu tantangan tersendiri bagi BNPP dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan dikarenakan efektivitas kinerja pengelolaan perbatasan ini bergantung pada komitmen lembaga terkait (Hasil Wawancara dengan BNPP, Januari 2024). Berdasarkan alur penyusunan kebijakan pembangunan perbatasan, dimana setiap keluhan maupun keperluan masyarakat di wilayah perbatasan ini ditampung, disusun dalam penyusunan agenda, yang kemudian diformulasikan atau dirumuskan, kemudian di berikan kepada Gubernur selaku kepala pemerintahan yang ada di provinsi, yang selanjutnya Gubernur memberikan kepada BNPP untuk disahkan dan ditindak lanjuti. Yang kemudian rumusan kebijakan atau program ini diberikan wewenang kepada kementerian atau lembaga terkait sebagai pelaksana (Hasil Wawancara, 2023)

## **KESIMPULAN**

Patut untuk diakui bahwa pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan perannya dalam hal pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan melalui hadirnya kebijakan-kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada program-program untuk pemberdayaan maupun menjamin kesejahteraan secara menyeluruh. Hal ini kemudian telah nampak pengimplementasiannya di kawasan perbatasan yang ada di Pulau Miangas, terdapat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri masih terdapat banyak program-

program yang belum terlaksana dimana masih terdapat isu-isu atau permasalahan strategis yang ada di Pulau Miangas. Penyelarasan antara program dengan pengimplementasiannya ini tidak luput dari tantangan pembangunan yang hadir di kawasan perbatasan dikarenakan untuk mewujudkan pembangunan memang harus terintegrasi secara menyeluruh yang didorong oleh koordinasi yang kuat antara semua sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah serta didukung oleh sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat.

## **SARAN**

Kebijakan Pembangunan Perbatasan melalui berbagai program yang ada telah mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat perbatasan. Akan tetapi masih terdapat begitu banyak faktor atau isu strategis yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah dengan memanfaatkan konstalasi ruang wilayah dari Pulau Miangas dengan sumber daya yang dimiliki yang diikuti dengan sinergitas pemerintah secara menyeluruh dari pusat hingga daerah dalam mengkawal kebijakan-kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang ada di Pulau Miangas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antara. 2017. *Pembangunan Perbatasan tak Sekadar Fisik*.  
<https://www.antaranews.com/video/35500/pembangunan-perbatasan-tak-sekadar-fisik>
- Arifin, S. 2015. *HUKUM PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kecamatan Miangas dalam Angka 2023*.  
<https://talaudkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/fd0213f3805eba9048bd9a66/kecamatan-miangas-dalam-angka-2023.html>
- BAPELITBANG. 2023. *RENSTRA BAPELITBANG KAB. KEPL. TALAUD TAHUN 2020-2025*.  
<https://www.talaudkab.go.id/wp-content/uploads/2023/02/1.-RENSTRA-2020-2025-BAPELITBANG.pdf>
- BJ Encarnacau, et. al. 2022. *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam upaya mengatasi Illegal Border*

- Crosser. *Journal Social Science*, 9(2), 39–45. <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jss>
- BNPP. 2021a. *Latar Belakang BNPP*. <https://datasarprasip.bnpp.go.id/profil-latar-belakang>
- BNPP. 2021b. *Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Jadi Prioritas Utama Timwas DPR RI*. <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/1202/pendekatan-kesejahteraan-masyarakat-perbatasan-jadi-prioritas-utama-timwas-dpr-ri>
- BNPP RI. 2022. *Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan PLBN di Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud*.
- BNPP RI. 2023. *Menko Polhukam: Secara Bertahap Wajah Perbatasan Sudah Berubah Menuju ke Arah yang Lebih Baik*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. <https://bnpp.go.id/berita/menko-polhukam:-secara-bertahap-wajah-perbatasan-sudah-berubah-menuju-ke-arah-yang-lebih-baik>
- BPPD SULUT. 2021. *Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur pada 14 kecamatan Lokpri di Provinsi Sulawesi Utara*.
- Gagola, D. 2023. *GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DAN BCA - BTA RI PHILIPINA DI PROVINSI SULAWESI UTARA*.
- Hadiwijoyo, S. S. 2011. *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional* (1 ed.). Graha Ilmu.
- Priyono, J. 2017. *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi* (J. Priyono & P. . Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A. (ed.)). Universitas Pertahanan.
- Rachman, C. I., Hukum, F., Pancasila, U., Sawah, S., & Jakarta, K. n.d.. *KORELASI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT GØSTA ESPING-ANDERSEN DENGAN PANCASILA DALAM PENGATURAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*.
- Rahman, A. 2018. Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Rosa, N. 2022. Sosok Pulau di Indonesia yang Pernah Diperebutkan Amerika-Belanda. *detik Edu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6350802/sosok-pulau-di-indonesia-yang-pernah-diperebutkan-amerika-belanda>
- Setneg. 2018. *Badan Nasional Pengelola Perbatasan*. Kementerian Sekretariat Negara. [https://www.setneg.go.id/view/index/badan\\_nasional\\_pengelola\\_perbatasan\\_1](https://www.setneg.go.id/view/index/badan_nasional_pengelola_perbatasan_1)
- Simbolon, F. S., Kadarini, S. N., & Juniardi, F. 2015. KABUPATEN SINTANG ( STUDI KASUS KECAMATAN KETUNGAU HULU ) daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat masih merupakan daerah tertinggal dengan infrastruktur yang kurang memadai , tentu saja hal ini masyarakat perbatasan yang jauh lebih rendah dibanding. *JeLAST: Jurnal elektronik Laut, Sipil, Tambang*, 1(1), 1–16.
- Sudiar, S. 2012a. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PULAU SEBATIK, INDONESIA. *Jurnal Paradigma*, 1(3). <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/316>
- Sudiar, S. 2012b. Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 1(3), 389–402.
- Tampomuri, H. R. O. Y. 2018. *Politik Perbatasan: Sekuritisasi dan Prosperity, Studi Kasus di Pulau Miangas*. Universitas Gajah Mada.